

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### V.1 Simpulan

Berdasarkan penulisan yang telah penulis lakukan, maka dapat diperoleh dari pembahasan tersebut suatu simpulan sebagai berikut.

1. Faktor – faktor penyebab nasabah menutup rekening tabungan pada Bank DKI Kantor Cabang Pembantu Depok adalah faktor Kartu Jakarta Pintar (KJP) lulus, nasabah meninggal, ada keperluan, tidak digunakan, dan kontrak sudah selesai. Faktor nasabah menutup rekening tabungan dengan alasan Kartu Jakarta Pintar (KJP) lulus adalah faktor penyebab tertinggi yaitu sebesar 61 dari 88 nasabah selama periode waktu 6 (enam) bulan terhitung dari September 2023 – Februari 2024. Dengan hasil produk tabungan yang paling banyak ditinggalkan adalah produk Tabungan Monas Pelajar Pintar (KJP).
2. *Churn rate* Bank DKI Kantor Cabang Pembantu Depok selama periode waktu 6 (enam) bulan terhitung dari September 2023 – Februari 2024 selalu berada di bawah angka 1% dan jumlah *churn rate* selama 6 (enam) bulan sebesar 1.45%. *Churn rate* tertinggi berada pada bulan Oktober 2023 dengan persentase *churn* sebesar 0.45%.

#### V.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan tugas akhir di atas, berikut merupakan saran penulis yang dapat diberikan :

1. Bagi Penulis Selanjutnya

Bagi penulis selanjutnya yang ingin melakukan penulisan lebih lanjut, disarankan untuk dapat memperluas objek dan menambah variabel lain.

2. Bagi PT Bank DKI Kantor Cabang Pembantu Depok

Bagi PT Bank DKI Kantor Cabang Pembantu Depok diharapkan dapat meminimalisir angka kehilangan nasabah pada setiap bulan dengan hal yang dapat dilakukan yaitu *Customer Service* dapat menawarkan produk lain kepada nasabah yang ingin menutup rekening Tabungan Monas Pelajar Pintar (KJP) yang telah lulus dengan tabungan pelajar yang ada pada Bank DKI yaitu tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) dan Tabungan Monas Pelajar.

### 3. Bagi Pemerintah

Bagi Pemerintah diharapkan dapat menindaklanjuti permasalahan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang saat ini mendapatkan banyak masalah dalam penyebaran bantuan pendidikannya, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang tidak tepat sasaran dan tidak merata. Diharapkan pemerintah dapat mengkaji kebijakan mengenai sekolah gratis yang diusulkan oleh Komisi E DPRD DKI.